



PENGUATAN TATA KELOLA PARIWISATA BERBASIS KOLABORATIF UNTUK MENINGKATKAN KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROVINSI SUMATERA SELATAN

Yuniartini

bappeda Provinsi Sumatera Selatan

e-Mail: yuni. bappeda2024@gmail.com

Submit Tgl: 05-Juni-2026

Diterima Tgl: 09-Juni-2026

Diterbitkan Tgl: 11-Juni-2026

ABSTRACT: *The tourism sector plays a strategic role in promoting regional economic growth through increasing Gross Regional Domestic Product (GRDP), creating employment opportunities, and strengthening the creative economy. However, the contribution of the tourism sector to the GRDP of South Sumatra Province remains relatively low compared to its tourism potential. This study aims to analyze the factors causing the low contribution of the tourism sector to GRDP and to formulate priority policies for improving regional tourism performance. This study employed a qualitative approach with a descriptive-analytical design using the Evidence-Based Policy and Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) methods. The research population consisted of tourism stakeholders in South Sumatra, while the sample was selected using purposive sampling involving representatives from government institutions, academics, and tourism businesses. Research instruments included semi-structured interviews, MCDA scoring questionnaires, and secondary data from Statistics Indonesia and regional planning documents. Data analysis techniques involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that weak and non-integrated collaborative tourism governance was the main factor behind the low contribution of the tourism sector to regional GRDP. The conclusion of this study confirms that strengthening collaborative-based tourism destination governance is the most strategic policy for increasing the sustainable contribution of the tourism sector to the GRDP of South Sumatra Province.*

Keywords: *Collaborative Governance, Destination Branding, Evidence-Based Policy, Sustainable Tourism, Tourism Development*

ABSTRAK: Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi kreatif. Namun, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan masih relatif rendah dibandingkan potensi wisata yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB serta merumuskan kebijakan prioritas untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis melalui metode *Evidence-Based Policy* dan *Multi Criteria Decision Analysis* (MCDA). Populasi penelitian meliputi seluruh pemangku kepentingan sektor pariwisata di Sumatera Selatan, sedangkan sampel dipilih menggunakan *purposive sampling* yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Instrumen penelitian berupa wawancara semi terstruktur, kuesioner skoring MCDA, dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik serta dokumen perencanaan daerah. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola pariwisata yang belum terintegrasi dan kolaboratif menjadi faktor utama rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan tata kelola destinasi wisata berbasis kolaboratif merupakan kebijakan paling strategis untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Destination Branding, Evidence-Based Policy, Sustainable Tourism, Tourism Development

Cara mengutip Yuniartini. (2026). Penguatan Tata Kelola Pariwisata Berbasis Kolaboratif untuk Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 1834–1849. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1978>

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Selain berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor pariwisata juga mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat lokal. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, pariwisata ditetapkan sebagai sektor prioritas pembangunan nasional melalui penguatan destinasi, promosi, konektivitas, dan kualitas layanan wisata. Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi wisata yang cukup besar, mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, hingga olahraga, seperti kawasan Sungai Musi, warisan budaya Sriwijaya, serta berbagai event olahraga dan budaya yang berskala nasional maupun internasional. Potensi tersebut seharusnya mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan (Supriyanto et al., 2024; Bahreisy et al., 2024).

Namun demikian, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan masih relatif rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2025, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB Sumatera Selatan pada tahun 2024 hanya mencapai 2,01 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi wisata yang dimiliki belum mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang optimal bagi daerah. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata ini juga mengindikasikan bahwa pengembangan destinasi wisata di Sumatera Selatan belum sepenuhnya berjalan secara efektif, khususnya dalam menciptakan daya tarik wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa sektor pariwisata yang tidak dikelola secara terintegrasi cenderung mengalami stagnasi kunjungan wisatawan serta kurang memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal (Nur et al., 2024; Riyanto et al., 2024).

Permasalahan utama dalam pengembangan sektor pariwisata Sumatera Selatan terletak pada lemahnya tata kelola pariwisata yang terintegrasi dan kolaboratif. Pengembangan sektor pariwisata masih berjalan secara parsial antarinstansi sehingga koordinasi lintas sektor belum optimal. Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah yang menyebabkan sinkronisasi program pengembangan wisata belum berjalan secara efektif. Supriyanto et al. (2024) menegaskan

bahwa keberhasilan pengembangan sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh kolaborasi multipihak, baik pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat. Selain itu, sinkronisasi kebijakan pembangunan pariwisata juga menjadi faktor penting dalam menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan pendapatan daerah (Bahreisy et al., 2024).

Selain lemahnya tata kelola, pengembangan pariwisata di Sumatera Selatan juga belum terintegrasi dengan pembangunan sektor lain yang terkait, seperti transportasi, ekonomi kreatif, UMKM, dan teknologi digital. Banyak destinasi wisata yang memiliki potensi besar, namun belum dikelola secara profesional sehingga belum mampu menarik wisatawan secara konsisten. Keterbatasan konektivitas dan infrastruktur pendukung wisata juga menjadi kendala dalam meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata. Penelitian Riyanto et al. (2024) menunjukkan bahwa integrasi teknologi, infrastruktur, dan tata kelola yang baik mampu meningkatkan daya saing sektor pariwisata secara berkelanjutan. Di sisi lain, ketergantungan terhadap event besar dan wisata musiman menyebabkan sektor pariwisata belum berkembang menjadi destinasi unggulan yang mampu menarik kunjungan sepanjang tahun. Fenomena seasonality tersebut menjadi tantangan serius dalam pengembangan destinasi wisata daerah (Tresidder & Deakin, 2023; Onga & Coetzee, 2023).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pariwisata, integrasi pembangunan lintas sektor, dan profesionalisme pengelolaan destinasi wisata. Penelitian ini penting dilakukan karena sektor pariwisata memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus analisis tata kelola pariwisata terintegrasi berbasis kolaborasi lintas sektor dalam konteks pengembangan pariwisata daerah di Sumatera Selatan, yang masih relatif terbatas dikaji pada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan pariwisata yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kontribusi ekonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk merumuskan kebijakan peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena kebijakan secara mendalam (Creswell, 2021). Metode yang digunakan adalah *Evidence-Based Policy* (EBP) dan *Multi Criteria Decision Analysis* (MCDA) untuk memastikan kebijakan berbasis data dan dinilai secara objektif (OECD, 2024; Dodgson et al., 2009; Ansell & Gash, 2008).

Instrumen penelitian meliputi wawancara semi terstruktur, kuesioner skoring MCDA, dan data sekunder dari BPS serta dokumen perencanaan daerah. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Emzir, 2021; Sugiyono, 2022). MCDA digunakan untuk menilai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria tertentu secara kuantitatif (He et al., 2024).

Populasi penelitian mencakup seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Sumatera Selatan. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu informan yang dianggap memahami isu penelitian (Sudaryono, 2021). Responden MCDA berjumlah enam orang dari unsur pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha (Creswell, 2021).

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap: (1) identifikasi masalah menggunakan data BPS dan dokumen perencanaan; (2) analisis penyebab masalah dengan pendekatan teoritis seperti collaborative governance dan sustainable tourism (Ansell & Gash, 2008; UNWTO, 2019); (3) penyusunan alternatif kebijakan; (4) penilaian menggunakan MCDA; dan (5) perumusan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (Kementerian PPN/Bappenas, 2025).

Prosedur ini memastikan bahwa rekomendasi kebijakan bersifat sistematis, berbasis data, dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

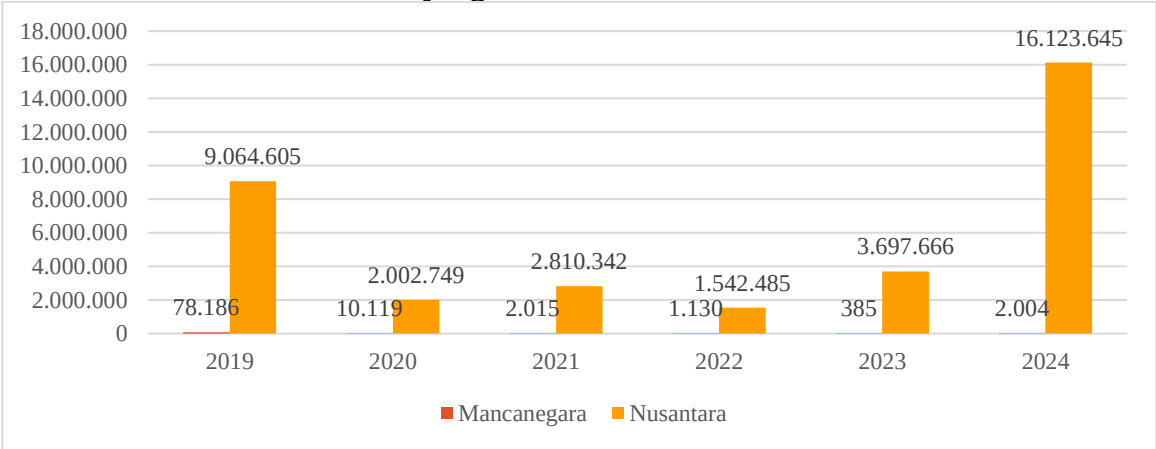
Dukungan Data dan Analisis Empiris

Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian penting dari upaya diversifikasi struktur ekonomi daerah dan pengurangan ketergantungan terhadap sektor-sektor ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak terbarukan. Dalam konteks pembangunan daerah jangka menengah, sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Namun demikian, hingga saat ini kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan masih belum optimal apabila dibandingkan dengan potensi yang dimiliki.

Tabel 1. Realisasi Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (Miliar Rupiah)

Sektor	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.519,35	8.933,41	10.470,48	12.044,55	13.370,89
Total PDRB	454.607,40	493.636,85	590.079,43	629.168,67	663.961,72
Rasio (%)	1,87	1,81	1,77	1,91	2,01

Grafik 1. Jumlah Kunjungan Wisata Provinsi Sumatera Selatan



Tabel 2. Rata Rata Lama Tinggal Wisatawan

NO	TAHUN	WISATAWAN	
		MANCANEGARA	NUSANTARA
1.	2022	2,80	1,41
2.	2023	3,27	1,36
3.	2024	2,15	1,37

Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan secara nominal. Namun demikian, kontribusi persentasenya terhadap total PDRB masih relatif rendah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan nominal yang konsisten selama periode 2020–2024. Nilai PDRB sektor ini meningkat dari Rp. 8.519,35 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 13.370,89 miliar pada tahun 2024, atau tumbuh sekitar 56,9 persen dalam lima tahun terakhir.

Sejalan dengan peningkatan nilai absolut tersebut, rasio kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, rasio kontribusi tercatat sebesar 1,87 persen, kemudian mengalami penurunan pada 2021 dan 2022 menjadi 1,81 persen dan 1,77 persen, yang mencerminkan dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas pariwisata dan sektor pendukungnya. Namun demikian, pada periode pemulihan pascapandemi, kontribusi sektor ini kembali meningkat menjadi 1,91 persen pada 2023 dan mencapai 2,01 persen pada 2024. Sementara itu, Elastisitas sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023-2024 bersifat elastis yaitu % sebesar 1,3 artinya setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan share sektor pariwisata sebesar 1,3%. Elastisitas sektor pariwisata meningkat cukup tajam pada saat terdapat event seperti ASIAN Games tahun 2018.

Meskipun menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang positif, kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata daerah serta kontribusi sektor-sektor

ekonomi utama lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas pariwisata belum sepenuhnya mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang optimal dan berkelanjutan bagi perekonomian daerah.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun sektor pariwisata mengalami pertumbuhan, namun kontribusinya terhadap struktur ekonomi daerah masih belum optimal. Di sisi lain, kunjungan wisatawan nusantara mengalami peningkatan signifikan setelah pandemi Covid-19. Namun demikian peningkatan jumlah kunjungan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kontribusi ekonomi sektor pariwisata.

Hal ini disebabkan karena karakteristik wisatawan masih didominasi oleh *short stay tourism* dengan tingkat belanja yang relatif rendah. Lama tinggal wisatawan nusantara rata-rata masih berada pada kisaran 1–2 hari sehingga dampak ekonomi terhadap sektor akomodasi, kuliner, dan ekonomi lokal belum optimal.

Selain itu, jumlah wisatawan mancanegara masih relatif rendah sehingga kontribusi terhadap peningkatan devisa dan nilai tambah ekonomi daerah belum signifikan.

Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa perkembangan kunjungan wisatawan ke Sumatera Selatan selama periode 2019–2024 didominasi oleh wisatawan nusantara, sementara jumlah wisatawan mancanegara relatif sangat terbatas.

Kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan tajam sejak tahun 2019 yang tercatat sebanyak 78.186 kunjungan, menjadi hanya 10.119 kunjungan pada 2020, dan terus menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2023 sebanyak 385 kunjungan. Pada tahun 2024, kunjungan wisatawan mancanegara mulai menunjukkan tanda pemulihan dengan meningkat menjadi 2.004 kunjungan, namun angka ini masih jauh di bawah kondisi sebelum pandemi.

Sebaliknya, kunjungan wisatawan nusantara menunjukkan tren pemulihan yang sangat signifikan. Setelah mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 menjadi 2.002.749 kunjungan, jumlah wisatawan nusantara meningkat secara bertahap dan melonjak tajam pada tahun 2024 menjadi 16.123.645 kunjungan, melampaui capaian tahun 2019 yang tercatat sebesar 9.064.605 kunjungan.

Dominasi wisatawan nusantara dengan lonjakan jumlah kunjungan yang signifikan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa karakteristik kunjungan wisatawan masih didominasi oleh perjalanan singkat dengan tingkat belanja yang relatif rendah, sehingga dampak ekonomi yang dihasilkan belum optimal.

Ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan nusantara, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam pengembangan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Permasalahan tersebut tidak hanya terletak pada kuantitas kunjungan wisatawan, tetapi terutama pada kualitas pengelolaan destinasi, pengemasan produk wisata, serta tata kelola sektor pariwisata secara keseluruhan.

Data empiris ini memperkuat argumen bahwa permasalahan utama pengembangan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan terletak pada lemahnya tata kelola destinasi wisata yang terintegrasi dan kolaboratif. Tanpa perbaikan tata kelola, peningkatan jumlah

wisatawan berpotensi tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap PDRB daerah.

Oleh karena itu, data ini menjadi dasar yang kuat bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang berfokus pada penguatan tata kelola destinasi wisata berbasis kolaboratif sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan secara berkelanjutan.

Dukungan Teori dan Konsep

1. Collaborative Governance Theory

Teori Tata Kelola Kolaboratif merujuk pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan pelaku publik dan swasta secara bersama-sama yang berorientasi pada konsensus. Model ini dipandang efektif dalam mengatasi kompleksitas kebijakan publik yang bersifat lintas sektoral dan membutuhkan sinergi antar pihak. Dalam konteks pengelolaan pariwisata, pendekatan collaborative governance menjadi sangat relevan. Keterlibatan masyarakat lokal, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah secara aktif dapat memperkuat legitimasi kebijakan, mengurangi konflik kepentingan, serta meningkatkan kualitas implementasi program pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan (Ansell & Gash, 2008).

2. Destination Branding

Destination branding merupakan konsep yang menekankan pentingnya citra dan identitas destinasi wisata dalam menarik minat wisatawan. Penguatan branding destinasi menjadi penting untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata dan memperkuat positioning daerah di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, destination branding bukan sekadar slogan atau logo, melainkan bagaimana sebuah daerah membangun reputasi melalui budaya, masyarakat, kebijakan, dan pengalaman wisatawan. Branding yang kuat akan menciptakan identitas kompetitif (*competitive identity*) yang membedakan suatu destinasi dari pesaingnya (Simon Anholt 2007).

Menurut Philip Kotler, *place branding* adalah proses menciptakan dan mengkomunikasikan identitas suatu tempat agar memiliki nilai kompetitif di pasar global. Kotler menyatakan bahwa suatu tempat dapat dipasarkan seperti produk yang memiliki nilai, citra, dan posisi tertentu dalam benak konsumen (Philip Kotler, et al 2014).

Dalam sektor pariwisata, *destination branding* menjadi penting karena wisatawan cenderung memilih destinasi berdasarkan citra dan pengalaman yang mereka bayangkan sebelum melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, keberhasilan branding destinasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi pemasaran, kualitas layanan, budaya lokal, serta pengalaman wisatawan selama berkunjung.

3. Sustainable Tourism Development

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada peningkatan kualitas destinasi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Konsep ini berkembang karena adanya dampak negatif pariwisata seperti kerusakan lingkungan, eksploitasi budaya lokal, dan ketimpangan ekonomi masyarakat sekitar destinasi wisata. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Menurut *World Tourism Organization (UNWTO)*, *sustainable tourism* adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini maupun masa depan dengan memenuhi kebutuhan wisatawan, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat.

Menurut United Nations Environment Programme dan UNWTO, prinsip *sustainable tourism* meliputi:

- A. Kelestarian Lingkungan
Pariwisata harus menjaga ekosistem dan sumber daya alam.
- B. Keberlanjutan Sosial dan Budaya
Menghormati budaya lokal serta menjaga nilai tradisi masyarakat.
- C. Keberlanjutan Ekonomi
Memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal.
- D. Partisipasi Masyarakat
Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan wisata.
- E. Kepuasan Wisatawan
Memberikan pengalaman wisata yang berkualitas dan bertanggung jawab

Dukungan Kebijakan dan Regulasi

1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
2. RPJMN 2025-2029
Sektor pariwisata ditetapkan sebagai salah satu dari tiga prioritas nasional dalam pembangunan ekonomi, dengan target peningkatan nilai tambah serta kontribusi terhadap PDB sebesar 4.6% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 5% pada tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi menjadi kunci utama. Infrastruktur yang baik meningkatkan aksesibilitas, menurunkan biaya logistik, memperkuat konektivitas, dan mendorong pengembangan industri kreatif dan sektor pariwisata secara berkelanjutan (Kementerian PPN/ Bappenas, 2025).
3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
4. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029
Rasio PDRB Sektor akomodasi, makan dan minum ditetapkan sebagai salah satu indikator pendukung untuk capaian PDB dari sektor pariwisata pada tahun 2029 ditetapkan sebesar 2,4%.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 tahun 2016
Perda No. 9 Tahun 2016 berisi tentang aspek pengembangan destinasi dan kawasan strategis pariwisata, pemasaran dan ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan

kemitraan serta pengawasan dan pengendalian. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan industri pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Pendekatan Analisis Kebijakan

Policy paper ini menggunakan pendekatan Evidence-Based Policy (EBP), yaitu pendekatan perumusan kebijakan yang menggunakan data, bukti empiris, dan hasil riset sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Selain itu, digunakan metode Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) untuk menilai alternatif kebijakan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

1. Urgensi kebijakan;
2. Potensi manfaat ekonomi;
3. Kemudahan implementasi;
4. Dukungan pemangku kepentingan;
5. Keberlanjutan jangka panjang.

Metode MCDA digunakan agar proses pengambilan keputusan kebijakan dilakukan secara objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Alternatif Kebijakan.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, akar penyebab, serta landasan teori yang relevan, alternatif kebijakan disusun secara sistematis untuk memberikan solusi yang tepat saran. Setiap alternatif kebijakan dievaluasi menggunakan metode penilaian kuantitatif dengan skala skor 1 hingga 5, yang mengukur beberapa aspek penting yaitu tingkat urgensi, potensi manfaat ekonomi yang akan diperoleh, kemudahan pelaksanaan kebijakan, keberlanjutan jangka panjang, serta dukungan publik yang menjadi penentu keberhasilan implementasi. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan total skor dan rata-rata dari setiap isu yang diangkat. Hasil pengurutan nilai rata-rata tertinggi ke terendah menjadi prioritas penentu kebijakan, dimana isu atau kebijakan dengan skor tertinggi dianggap paling mendesak dan memiliki potensi dampak terbesar, sehingga menjadi fokus utama dalam penyusunan policy paper dan langkah implementasi.

Analisis alternatif kebijakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai berbagai opsi kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan akar permasalahan yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya, serta dengan memperhatikan kerangka kebijakan nasional dan daerah yang berlaku.

Alternatif kebijakan yang dianalisis difokuskan pada kebijakan-kebijakan yang memiliki potensi untuk memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja sektor pariwisata secara keseluruhan. Setiap alternatif kebijakan dianalisis secara komparatif dengan mempertimbangkan aspek manfaat ekonomi, kemudahan implementasi, keberlanjutan, serta dukungan pemangku kepentingan. Maka pilihan alternatif kebijakan adalah sebagai berikut:

Alternatif kebijakan pertama adalah Penetapan Peraturan Kepala Daerah terkait penguatan tata kelola destinasi wisata berbasis kolaboratif.

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan pariwisata melalui pembentukan mekanisme *collaborative governance* yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat lokal.

Kebijakan ini juga diarahkan untuk: 1). Mengembangkan paket wisata terpadu, 2). Mengintegrasikan sektor pariwisata dengan UMKM dan ekonomi kreatif, 3). Mengembangkan branding regional seperti “Sumsel Wonderful 2030”, 4). Meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata, 5). Mendorong peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan.

Alternatif kebijakan ini memiliki potensi dampak ekonomi yang tinggi karena mampu memperkuat multiplier effect sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah.

Alternatif kebijakan kedua adalah pengembangan infrastruktur dan konektivitas pariwisata.

Kebijakan ini berfokus pada peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, serta peningkatan konektivitas antar destinasi wisata. Pengembangan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan wisatawan, serta membuka peluang pengembangan paket wisata terpadu. Alternatif kebijakan ini relatif mudah dipahami dan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan daya tarik destinasi wisata. Namun demikian, pengembangan infrastruktur membutuhkan investasi yang besar dan waktu implementasi yang relatif panjang, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kontribusi PDRB pariwisata cenderung bersifat jangka menengah hingga panjang.

Alternatif kebijakan ketiga adalah penguatan promosi dan branding destinasi wisata melalui integrated digital branding. Kebijakan ini menekankan penguatan promosi digital, optimalisasi portal resmi pariwisata, pemanfaatan media sosial, dan pengembangan strategi branding destinasi yang lebih terintegrasi.

Penguatan branding diharapkan mampu meningkatkan visibilitas destinasi wisata Sumatera Selatan dan menarik wisatawan dengan tingkat belanja yang lebih tinggi.

Penilaian Alternatif Kebijakan

Penilaian alternatif kebijakan dilakukan menggunakan metode MCDA dengan skoring 1–5 berdasarkan lima kriteria utama, masing-masing sebagai berikut:

- ✓ Kriteria 1 (K1, 30%), terkait dampak terhadap kualitas Pengelolaan Pariwisata (seberapa besar kebijakan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan);
- ✓ Kriteria 2 (K2, 25%), terkait Kesesuaian dengan Regulasi (Seberapa baik kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan pariwisata, seperti Permenpar Nomor 6 Tahun 2025);
- ✓ Kriteria 3 (K3, 20%), terkait waktu pelaksanaan kebijakan (apakah dapat dilaksanakan segera);

- ✓ Kriteria 4 (K4, 15%), implementabilitas di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (apakah kebijakan ini mudah diterapkan dan dapat dilakukan oleh seluruh pihak terkait);
- ✓ Kriteria 5 (K5,10%), keberlanjutan dan jangka panjang (apakah kebijakan ini dapat bertahan dalam jangka panjang dan terus memberikan manfaat masyarakat dalam meningkatkan pendapatan sektor pariwisata).

Adapun penilaian skoring dilakukan oleh *keyperson* di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota serta pelaku usaha pariwisata Sumatera Selatan dengan skoring:

Nilai Skoring:

1. Sangat Rendah
2. Rendah
3. Sedang
4. Tinggi
5. Sangat Tinggi

Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 . Skoring Alternatif Kebijakan

Aternatif Kebijakan	K1	K2	K3	K4	K5	Skor Total
Kebijakan yang diimplementasikan melalui Penetapan Peraturan Kepala Daerah terkait penguatan tata kelola destinasi wisata berbasis kolaboratif. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan pariwisata melalui pembentukan mekanisme collaborative governance yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat lokal. Kebijakan ini juga diarahkan untuk: 1). Mengembangkan paket wisata terpadu, 2). Mengintegrasikan sektor pariwisata dengan UMKM dan ekonomi kreatif, 3). Mengembangkan branding regional seperti “Sumsel Wonderful 2030”, 4). Meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata, 5). Mendorong peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan.	5	5	5	5	5	5
Kebijakan pengembangan infrastruktur dan konektivitas pariwisata. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, serta peningkatan konektivitas antar destinasi wisata. Pengembangan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan wisatawan, serta membuka peluang pengembangan paket wisata terpadu. Alternatif kebijakan ini relatif mudah dipahami dan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan daya tarik destinasi wisata. Namun demikian, pengembangan infrastruktur membutuhkan investasi yang besar dan waktu implementasi yang relatif panjang, sehingga dampaknya	5	5	4	4	4	4,55

Aternatif Kebijakan	K1	K2	K3	K4	K5	Skor Total
terhadap peningkatan kontribusi PDRB pariwisata cenderung bersifat jangka menengah hingga Panjang.						
Kebijakan penguatan promosi dan branding destinasi wisata melalui integrated digital branding. Kebijakan ini menekankan penguatan promosi digital, optimalisasi portal resmi pariwisata, pemanfaatan media sosial, dan pengembangan strategi branding destinasi yang lebih terintegrasi.	5	4	4	4	3,	4,20

Sumber: Hasil Analisis 2026

Hasil analisis menggunakan metode Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) menunjukkan bahwa alternatif kebijakan penguatan tata kelola sektor pariwisata berbasis kolaboratif melalui penetapan Peraturan Gubernur memperoleh skor tertinggi sebesar 5,00. Nilai ini menunjukkan bahwa alternatif kebijakan tersebut dinilai paling unggul berdasarkan seluruh kriteria penilaian, baik dari aspek dampak ekonomi, kesesuaian regulasi, kemudahan implementasi, maupun keberlanjutan kebijakan.

Alternatif kebijakan pengembangan infrastruktur dan konektivitas pariwisata menempati peringkat kedua dengan skor 4,55. Meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan, kebijakan ini membutuhkan investasi yang relatif besar serta waktu implementasi yang lebih panjang, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB cenderung bersifat jangka menengah hingga panjang.

Sementara itu, alternatif kebijakan penguatan promosi dan branding destinasi wisata melalui digital branding memperoleh skor 4,20 dan berada pada peringkat ketiga. Kebijakan ini relatif lebih mudah diimplementasikan dan penting untuk meningkatkan visibilitas destinasi wisata. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas tata kelola destinasi dan kesiapan produk wisata yang tersedia.

Dengan demikian, hasil analisis MCDA menegaskan bahwa penguatan tata kelola destinasi wisata berbasis kolaboratif merupakan kebijakan prioritas yang paling strategis dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan, sementara pengembangan infrastruktur dan promosi destinasi berfungsi sebagai kebijakan pendukung yang perlu diintegrasikan dalam implementasi kebijakan utama.

Berdasarkan analisis komparatif terhadap ketiga alternatif kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masing-masing alternatif memiliki keunggulan dan keterbatasan. Penetapan Peraturan Kepala Daerah terkait Penguatan tata kelola destinasi wisata berbasis kolaboratif memiliki skor yang paling tinggi untuk semua kriteria, alternatif ini mempunyai potensi dampak yang paling komprehensif dan berkelanjutan karena mampu menjawab akar permasalahan pengembangan pariwisata. Sementara itu, pengembangan infrastruktur dan penguatan promosi merupakan kebijakan pendukung yang tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan utama.

Dengan demikian, analisis alternatif kebijakan ini menjadi dasar penting dalam penentuan rekomendasi kebijakan prioritas yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Pendekatan analitis yang digunakan dalam bab ini memastikan bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya realistis, tetapi juga selaras dengan tujuan pembangunan pariwisata daerah jangka menengah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN.

1. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan, kerangka teoritis dan kebijakan, kondisi empiris sektor pariwisata, serta analisis alternatif kebijakan, direkomendasikan penetapan Peraturan Kepala Daerah terkait penguatan tata kelola destinasi wisata berbasis kolaboratif sebagai kebijakan prioritas untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan melalui kolaborasi pemerintah dan swasta dengan fokus penguatan kluster wisata berbasis kawasan unggulan. Rekomendasi kebijakan ini dipandang paling relevan dan strategis karena secara langsung menjawab akar permasalahan utama dalam pengembangan sektor pariwisata daerah.

Penguatan tata kelola sektor pariwisata berbasis kolaboratif diarahkan untuk menciptakan sistem pengelolaan pariwisata yang terintegrasi, profesional, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai fasilitator dan regulator, sektor swasta sebagai penggerak investasi dan inovasi, serta masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi pariwisata.

Substansi utama rekomendasi kebijakan ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, penguatan kelembagaan pengelolaan destinasi wisata melalui pembentukan atau revitalisasi lembaga pengelola destinasi yang memiliki kewenangan dan kapasitas yang memadai. Lembaga ini diharapkan mampu mengoordinasikan peran berbagai pemangku kepentingan serta memastikan pengelolaan destinasi dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, baik di tingkat pengelola destinasi, pelaku usaha, maupun masyarakat lokal. Peningkatan kapasitas ini meliputi pelatihan manajemen destinasi, pelayanan wisata, pemasaran digital, serta pengembangan produk wisata berbasis kearifan lokal. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, kualitas layanan dan pengalaman wisata diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

Ketiga, penguatan integrasi sektor pariwisata dengan sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Integrasi ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dari aktivitas pariwisata serta memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar destinasi. Pengembangan produk kuliner, kriya, dan seni budaya lokal menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan belanja wisatawan dan memperpanjang lama tinggal.

2. Alasan Pemilihan Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Penetapan Peraturan Kepala Daerah terkait penguatan tata kelola destinasi wisata berbasis kolaboratif dipilih karena memiliki keunggulan dibandingkan alternatif kebijakan lainnya. Dari sisi manfaat ekonomi, kebijakan ini berpotensi meningkatkan kualitas destinasi dan pengalaman wisata, yang pada akhirnya mendorong

peningkatan belanja dan lama tinggal wisatawan. Dari sisi implementasi, meskipun memerlukan komitmen kelembagaan dan koordinasi lintas sektor, kebijakan ini relatif lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kapasitas daerah.

Selain itu, rekomendasi kebijakan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Dalam RPJMN 2025–2029, penguatan tata kelola pariwisata dan peningkatan kualitas destinasi menjadi salah satu fokus utama pembangunan sektor pariwisata. Sementara itu, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 juga menekankan pentingnya pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan ini memiliki legitimasi kebijakan yang kuat dan peluang implementasi yang lebih besar.

Pendanaan implementasi kebijakan penguatan tata kelola destinasi wisata perlu dirancang secara realistis dengan memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia. APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota tetap menjadi sumber utama, khususnya untuk pembiayaan regulasi, penguatan kelembagaan pengelola destinasi, fasilitasi pelatihan SDM, serta dukungan promosi awal. Namun demikian, mengingat keterbatasan fiskal daerah dan banyaknya prioritas pembangunan lain, pembiayaan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada APBD. Oleh karena itu, perlu dilakukan diversifikasi pendanaan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, kemitraan dengan sektor swasta, serta optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan yang beroperasi di Sumatera Selatan. Program TJSL dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur ringan destinasi, penataan kawasan wisata, pelatihan pelaku UMKM, hingga penyelenggaraan event tematik yang mampu meningkatkan daya tarik kawasan.

Selain aspek pembiayaan, dukungan sumber daya lainnya juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik aparatur pengelola pariwisata maupun pelaku usaha lokal, perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas layanan dan pengemasan produk wisata semakin meningkat. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan sistem data pariwisata menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk mendukung promosi digital, penjualan paket wisata terpadu, serta pemantauan indikator kinerja seperti lama tinggal dan belanja wisatawan. Pengelolaan data yang lebih terintegrasi juga akan membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi efektivitas program serta menyesuaikan strategi secara cepat apabila terdapat kendala di lapangan. Dengan kombinasi pendanaan yang terdiversifikasi dan dukungan sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan diharapkan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi yang terukur bagi daerah dan masyarakat sekitar destinasi.

Penguatan tata kelola pariwisata berbasis kolaboratif menjadi sangat penting karena sektor pariwisata merupakan sektor lintas urusan yang tidak dapat dikembangkan secara parsial. Pengembangan destinasi wisata membutuhkan integrasi antara: infrastruktur, transportasi, ekonomi kreatif, UMKM, budaya, promosi, lingkungan hidup.

Tanpa tata kelola yang terintegrasi, potensi wisata Sumatera Selatan akan sulit berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan tata kelola kolaboratif juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing daerah di tengah persaingan destinasi wisata nasional dan global yang semakin

kompetitif, dengan demikian implementasi kebijakan penguatan tata kelola pariwisata berbasis kolaboratif diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan secara signifikan dan berkelanjutan

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya disebabkan oleh jumlah kunjungan wisatawan, tetapi lebih dipengaruhi oleh lemahnya tata kelola pariwisata yang belum terintegrasi dan kolaboratif. Meskipun jumlah wisatawan nusantara mengalami peningkatan signifikan pascapandemi, dampak ekonominya masih belum optimal karena karakteristik wisatawan didominasi oleh *short stay tourism* dengan tingkat belanja yang relatif rendah. Hasil analisis menggunakan pendekatan *Multi Criteria Decision Analysis* (MCDA) menunjukkan bahwa kebijakan penguatan tata kelola destinasi wisata berbasis kolaboratif melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah menjadi alternatif kebijakan paling prioritas dibandingkan pengembangan infrastruktur maupun penguatan promosi digital. Penguatan tata kelola dinilai mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas destinasi wisata, mendorong integrasi dengan UMKM dan ekonomi kreatif, serta meningkatkan lama tinggal wisatawan sehingga berdampak terhadap peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah secara berkelanjutan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada jumlah responden dalam penilaian MCDA yang relatif terbatas dan fokus penelitian yang hanya dilakukan pada lingkup Provinsi Sumatera Selatan sehingga generalisasi hasil penelitian ke daerah lain masih perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pendekatan kebijakan dan belum melakukan pengukuran kuantitatif secara mendalam terhadap dampak ekonomi pariwisata terhadap pendapatan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan cakupan responden yang lebih luas serta mengembangkan model pengukuran dampak ekonomi pariwisata berbasis data longitudinal. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pariwisata yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anholt, S. (2007). *Competitive identity: The new brand management for nations, cities and regions*. Palgrave Macmillan.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (2025). *Rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Produk domestik regional bruto Provinsi Sumatera Selatan menurut lapangan usaha*. BPS.

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Provinsi Sumatera Selatan dalam angka 2025*. BPS.
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. (2025). *Rencana strategis Tahun 2025–2029*.
- Dodgson, J., Spackman, M., Pearman, A., & Phillips, L. (2009). *Multi-criteria analysis: A manual*. Department for Communities and Local Government.
- Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- He, M., Tu, J., Li, Y., Fang, J., & Zeng, X. (2024). Tourist preference for tourism product brand biographies. *Annals of Tourism Research*, 107, 103773. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2024.103773>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2025). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025–2029*.
- Kotler, P., Bowen, J., & Makens, J. (2014). *Marketing for hospitality and tourism* (6th ed.). Pearson Education.
- OECD. (2024). *OECD tourism trends and policies 2024*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/80885d8b-en>
- Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix method* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyanto, A., Kusbandrijo, B., & Widodo, J. (2024). Tata kelola kolaboratif pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pacitan. *Jurnal Cakrawala*. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.680>
- United Nations World Tourism Organization. (2019). *International tourism highlights*. UNWTO.